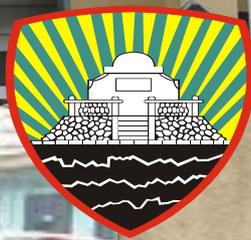


RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023



INSUN MEDAL



DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

Jln. Mayor Abdurahman No. 200 Telp. (0261) 201 463

SUMEDANG – 45322

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan Rahmat-Nya, kami dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan – Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2023. Rencana Kerja perubahan ini disusun sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang pada tahun 2023, yang didalamnya memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan prioritas program/kegiatan pada tahun 2023. Pada dasarnya Prioritas program dan kegiatan diarahkan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang tertuang pada Rencana Strategis-SKPD tahun 2018-2023 sejalan dengan arah kebijakan dan capaian matrik indikator sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023. Adapun alokasi pembiayaan guna menunjang program/kegiatan tersebut direncanakan bersumber dari Pagu Indikatif SKPD dan Pagu Indikatif Kewilayahan.

Demikian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensinya kepada semua pihak terkait yang membantu dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2023 ini.

Sumedang, 2023
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Kepala



H. DIKDIK SADIKIN, AK.S., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19720515 199803 1 010

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023	7
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	21
2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	22
2.3.2 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah	22
2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3.4 Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	37
3.2.1 Tujuan	38
3.2.2 sasaran	38
3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 s/d Triwulan II	8
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD s/d Triwulan II Tahun 2023	18
Tabel 2.3	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Triwulan II Tahun 2023	20
Tabel 2.4	Review terhadap Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran Murni 2023 dengan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	25
Tabel 3.1	Keterkaitan Renstra Dinsos Kabupaten Sumedang dengan Dokumen Perencanaan lainnya	35
Tabel 3.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Adapun untuk penyesuaian pelaksanaan dan anggaran program / kegiatan, maka SKPD melakukan perubahan Rencana Kerja dalam optimalisasi keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menguraikan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program, kegiatan, maupun sub kegiatan SKPD kedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai fungsinya didalam penyelenggaraan pembangunan dalam hal bidang urusan Sosial.
4. Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 ini merupakan rencana tahun kelima / terakhir sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2018-2023.

Mengingat pentingnya arti dokumen Perubahan Renja SKPD tahun 2023 dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka tata cara dan alur penyusunannya antara lain :

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berikutnya.
- b. Program dan kegiatan dalam renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

- c. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS Perubahan tahun 2023 yang memuat arah kebijakan Pemerintah dalam satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut Usia;
3. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Perwalian;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
24. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Pengungsi;
25. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial;
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
39. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang .. Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor);
47. Peraturan Bupati Sumedang nomor : 63 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Rumah Besar Simpati Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
48. Peraturan Bupati Sumedang No. 116 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun sebagai optimalisasi dan penyempurnaan dari Rencana Kerja Murni sebagai Perencanaan tahunan yang memuat Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Adapun maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yaitu:

- a) Memberikan informasi tentang Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023.
- b) Penyesuaian anggaran dalam mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan untuk pelayanan kesejahteraan sosial.
- c) Sebagai bahan masukan / landasan dalam menyusun kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, tujuan dalam menyusun Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b) Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan serta Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang pada Perubahan Tahun Anggaran 2023.
- c) Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II;

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan SKPD dalam melaksanakan rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu SKPD yang akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran SKPD, sekaligus dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tujuan tersebut selaras dengan Misi ke-1 (satu) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu *“Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat”* sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 s/d Triwulan II

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023				TOTAL REALISASI Tahun 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
				TRIWULAN					
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BELANJA URUSAN UMUM (ADUM)		6.297.255.123,-							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	109.554.360,-	100 Persen	26,32	15,79			42,11	42,11
	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	4.696.238.003,-	100 Persen	25,00	25,00			50,00	50,00
	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	30.718.800,-	100 Persen	25,00	25,00			50,00	50,00
	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	405.009.870,-	100 Persen	25,00	25,00			50,00	50,00
	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	182.590.110,-	100 Persen	25,00	25,00			50,00	50,00

	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	500.281.980,-	100 Persen	25,00	25,00			50,00	50,00
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	372.862.000,-	100 Persen	25,00	25,00			50,00	50,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.554.360,-	19 Laporan	5,00	3,00			8,00	42,11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.730.820,-	7 Dokumen	2	0			2	28,57
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	9.271.340,-	1 Dokumen	0	0			0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	6.380.990,-	1 Dokumen	0	0			0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.675.010,-	1 Dokumen	0	0			0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.815.450,-	1 Dokumen	0	0			0	0

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.680.750,-	12 Laporan	3	3			6	50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.696.238.003,-	12 Laporan	3,00	3,00			6,00	50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.679.104.493,-	50 Orang	28	28			56	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7.953.310,-	12 Dokumen	3	3			6	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.180.200,-	12 Laporan	3	3			6	50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.718.800,-	12 Laporan	3,00	3,00			6,00	50
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.718.800,-	10 Dokumen	2	3			5	50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.009.870,-	12 Laporan	3	3			6	50

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	72.089.670,-	1 Paket	0,25	0,25			0,50	50
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	80.160.000,-	12 Paket	3,00	3,00			6,00	50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	45.987.200,-	12 Paket	3,00	3,00			6,00	50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	9.624.000,-	10 Dokumen	-	2,00			2,00	20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.149.000,-	12 Laporan	3,00	3,00			6,00	50
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	41.000.000,-	12 Dokumen	3,00	3,00			6,00	50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.590.110,-	12 Laporan	3,00	3,00			6,00	50
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	123.198.570,-	4 Unit	-	3			3	75
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	59.391.540,-	12 Laporan	3,00	3			6	50

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.281.980,-	12 Laporan	3,00	3			6,00	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	42.181.980,-	12 Laporan	3,00	3			6,00	50
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14.140.000,-	12 Laporan	3,00	3			6,00	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	443.960.000,-	12 Laporan	3,00	3			6,00	50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.862.000,-	12 Laporan	3	3			6	50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	238.114.000,-	30 Unit	4	10			14	46,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	134.748.000,-	2 Unit	0	1			1	50
URUSAN SOSIAL		14.021.943.570,-							
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	1.385.034.540	16,2 Persen	-	-			-	0

	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		58,33 Persen	16,67	8,33			25,00	42,86
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial	35.000.000	20 Kelompok	-	-			-	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten / Kota	35.000.000	200 Keluarga	-	-			-	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	1.350.034.540	7 Jenis	2,00	1,00			3,00	42,86
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	109.950.000	277 Orang	-	-			-	0
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	49.591.440	26 Orang	-	26,00			26,00	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	1.190.493.100	277 Lembaga	277,00	277,00			277	100

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Penyanggung Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar	3.054.369.300	35,75 Persen	13,98	2,22			16,20	45,31
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggung Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyanggung Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	2.686.894.000	16007 Orang	6258	994			7252	45,31
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	2.291.820.500	16007 Orang	6258	841			7099	44,35
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50.000.000	100 Orang	0	50			50	50
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	245.073.500	450 Orang	0	103			103	22,89

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	100.000.000	150 Orang	7	16			23	15,33
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima bantuan Sosial kebutuhan	367.475.300	30 Orang	-	15,00			15,00	50
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	282.500.500	200 Orang	7	16,00			23,00	11,5
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	35.000.000	30 Orang	0	15			15	50
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	49.974.800	30 Orang	0	15,00			15,00	50
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	8.821.563.300	98 Persen	98,00	98,00			98	100
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	8.821.563.300	5 Dokumen	5	5			10	100

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	200.000.000	129417 Keluarga	129417	129417			129417	100
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	7.797.563.300	135000 Keluarga	135000	135000			13500	100
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	824.000.000	3360 Orang	-	-			-	0
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan dasar	684.631.830	100 Persen	-	50,00			50	50
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	358.568.950	100 Persen	-	50			50	50
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	358.568.950	400 Orang	-	200			200	50
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Intensitas Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	326.062.880	6 Kali	0	3			3	50

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	326.062.880	55 Orang	55	55			55	100
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan dan daerah yang dipelihara	76.344.600	100 Persen	100	100,00			100	100
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan Nasional dan Daerah yang dipelihara	76.344.600	3 Lokasi	3	3			3	100
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	49.464.600	3 Makam	3	3			3	100
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengaman Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26.880.000	12 Laporan	3	3			6	50
		20.319.198.693							

Tabel 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD s/d TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	75	72,37	96,49	
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30,86			Dalam Proses Penilaian
SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A			Dalam Proses Penilaian

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Analisis yang dilakukan adanya faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan, faktor yang dimaksud adalah kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan pihak lain dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program serta perkembangannya kerjasama lintas sektor, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai target capaian kinerja pelayanan SKPD. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang kewajiban daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka kinerja Dinas Sosial diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
3. SAKIP Perangkat Daerah;

Adapun ukuran keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur dengan *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten / Kota*, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar diluar panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial;
5. Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah kabupaten / Kota.

Tabel 2.3
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL TRIWULAN II TAHUN 2023

INDIKATOR SPM	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar diluar panti Sosial	Persen	100	70	70
Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Persen	100	57	57
Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar panti Sosial	Persen	100	18	18
Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100
Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah kabupaten / Kota	Persen	100	100	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan dan Pemberdayaan Sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan bidang Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan 3 aspek, yakni :

- 1) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pemberdayaan Sosial
- 2) Permasalahan dalam Aspek Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 3) Permasalahan dalam Aspek Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial / kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sesuai tugas dan fungsinya memiliki permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan maupun hambatannya adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya payung hukum atau aturan Pemerintah Daerah mengenai Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- b. Penerima Manfaat Bantuan Sosial masih ada yang belum tepat sasaran;
- c. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Tingkat Desa belum berjalan secara optimal sebagai pendukung Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat Kabupaten;
- d. Pemenuhan buffer stock bagi korban bencana masih rendah / belum optimal;
- e. Sarana dan Prasarana bagi pelayanan kesejahteraan sosial masih belum memenuhi standar;
- f. Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masih belum Optimal.

2.3.2 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Berdasarkan tingkat capaian kinerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang belum maksimal, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang perlu merancang rencana aksi pada rencana perubahan tahun 2023 yang dimuat dalam suatu dokumen Rencana Kerja SKPD, dengan harapan dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana yang telah ditargetkan. Adapun upaya tersebut diharapkan dapat mendukung ketercapaian ataupun upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan menjadikan Sumedang SIMPATI di tahun 2023.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumedang tentunya mempunyai tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya. Adapun tantangan dan peluang tersebut yaitu:

✓ Tantangan

Tantangan yang terjadi yaitu bertambahnya jumlah masyarakat yang mengajukan masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini disebabkan adanya Pengaruh yang signifikan akibat Pandemi Covid 19 terhadap kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Sumedang.

✓ Peluang

Adapun peluang yang dapat mendukung Dinas Sosial dalam menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai tugas dan fungsinya yaitu Peraturan Perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Dinas Sosial termasuk pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan dalam bidang sosial ke Daerah. Kemudian, adanya Lembaga yang mendukung Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diantaranya LKS, Yayasan, ataupun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya.

2.3.4 Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Rekomendasi maupun catatan strategis yang dapat disimpulkan dan untuk ditindak lanjuti Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam merencanakan Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang akan diprioritaskan dalam perencanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Adapun rekomendasi maupun catatannya yaitu berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023, tingkat capaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun tingkat capaian kinerja SKPD terhadap target yang tersirat dalam Indikator Kinerja

SKPD yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2018-2023.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023

Hasil 24nalisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.4

Review terhadap Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran Murni 2023 dengan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

NO	Dokumen Pelaksanaan dan Anggran SKPD (Murni)					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD Perubahan)					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	109.554.360	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	109.554.360	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	37.730.820	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	37.730.820	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.271.340	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.271.340	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.380.990	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.380.990	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.675.010	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.675.010	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.815.450	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.815.450	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	45.680.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	45.680.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	4.696.238.003	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	4.696.238.003	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	4.679.104.493	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	4.679.104.493	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7.953.310	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7.953.310	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	9.180.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	9.180.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	30.718.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	120.718.800	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinsos	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	30.718.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinsos	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	30.718.800	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	90.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	405.009.870	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	445.009.870	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.089.670	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.089.670	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.160.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.160.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.987.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.987.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	9.624.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	9.624.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	156.149.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	196.149.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	41.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	41.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	182.590.110	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	872.590.110	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	325.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	123.198.570	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	368.198.570	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	12 Laporan	59.391.540	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	12 Laporan	179.391.540	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	500.281.980	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	535.281.980	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.181.980	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.181.980	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	14.140.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	14.140.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	443.960.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	471.960.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	372.862.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	547.862.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	238.114.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	263.114.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	134.748.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	284.748.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	16,2 Persen	35.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	16,2 Persen	35.000.000	
			Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	58,33 Persen	1.350.034.540			Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	58,33 Persen	1.462.034.540	
			Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial	20 Kelompok	35.000.000		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial	20 Kelompok	35.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Sumedang	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Keluarga	35.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Sumedang	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Keluarga	35.000.000	

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	7 Jenis	1.350.034.540	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	7 Jenis	1.462.034.540	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	277 Orang	109.950.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	277 Orang	109.950.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	49.591.440	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	49.591.440	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	277 Lembaga	1.190.493.100	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	277 Lembaga	1.302.493.100	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV, dan Korban NAPZA) yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar	35,75 Persen	3.054.369.300	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV, dan Korban NAPZA) yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar	35,75 Persen	3.160.769.300	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar	16007 Orang	2.686.894.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar	16007 Orang	2.750.794.000	

	Penyediaan Permakanan	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	16007 Orang	2.291.820.500	Penyediaan Permakanan	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	16007 Orang	2.310.720.500	
	Penyediaan Sandang	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	70.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	245.073.500	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	245.073.500	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	100.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	125.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	30 Orang	367.475.300	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	30 Orang	409.975.300	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	282.500.500	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	325.000.500	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Sumedang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	35.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Sumedang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	35.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	Kab. Sumedang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga	30 Orang	49.974.800	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	Kab. Sumedang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga	30 Orang	49.974.800	

	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	98 Persen	8.821.563.300	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar	98 Persen	8.821.563.300	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	5 Dokumen	8.821.563.300	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	5 Dokumen	8.821.563.300	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	129417 Orang	200.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	129417 Orang	200.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sumedang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	135000 Keluarga	7.797.563.300	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sumedang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	135000 Keluarga	7.797.563.300	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Sumedang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3360 Orang	824.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Sumedang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3360 Orang	824.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan dasar	100 Persen	684.631.830	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang diberi bantuan Sosial kebutuhan dasar	100 Persen	761.131.830	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	100 Persen	358.568.950	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	100 Persen	358.568.950	
	Penyediaan Makanan	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	358.568.950	Penyediaan Makanan	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	358.568.950	

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Intensitas Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	6 Kali	326.062.880	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Intensitas Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	6 Kali	402.562.880	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	326.062.880	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Sumedang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	402.562.880	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Makam Pahlawan dan Daerah yang dipelihara	100 Persen	76.344.600	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Makam Pahlawan dan Daerah yang dipelihara	100 Persen	89.844.600	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam Pahlawan dan Daerah yang dipelihara	3 Lokasi	76.344.600	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam Pahlawan dan Daerah yang dipelihara	3 Lokasi	89.844.600	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	49.464.600	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	62.964.600	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 laporan	26.880.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 laporan	26.880.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Dalam satu tahun pertama, yakni pada 2015, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Hal itu disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak," seperti tertulis dalam Perpres tersebut. Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan," kata Perpres itu. RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sementara Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang secara substantif bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian sosial tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Adapun arah kebijakan nasional maupun provinsi Jawa Barat mengenai Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Adapun keterkaitan Renstra Dinsos dengan Dokumen Perencanaan lainnya disajikan pada tabel 3.2

sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Renstra Dinsos Kabupaten Sumedang dengan Dokumen Perencanaan lainnya

KEMENTERIAN SOSIAL		DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT		DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG	
URUSAN SOSIAL					
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif	1 Penataan Asistensi Sosial melalui Program Keluarga produktif dan sejahtera	1 Mempercepat penanganan permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial terhadap Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Program prioritas Bebas PMKS Jalanan	1 Mengoptimalkan kemitraan dengan PSKS dan memanfaatkan sarana / prasarana pelayanan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial.	1 Menyelenggarakan pelayanan terhadap PMKS secara merata untuk semua wilayah;	1 Peningkatan pelayanan terhadap Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
	2 Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal miskin dan rentan	2 Revitalisasi, Optimalisasi dan Fasilitas Balai/Panti Sosial yang menangani Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Mengoptimalkan kemampuan Profesionalitas SDM Dinas Sosial untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.	2 Meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat;	2 Peningkatan penanganan bagi Korban Bencana;
	3 Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek kehidupan	3 Meningkatkan efektifitas, kapasitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	3 Meningkatkan kerjasama dengan Akademisi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial.	3 Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Peyandang Masalah Sosial (PMKS);	3 Penguatan kapasitas dan kualitas mitra sosial;
	4 Penguatan kelembagaan sosial yang meliputi standar pelayanan, sistem rujukan, data dan sistem pengaduan yang terintegrasi serta asistensi sosial	4 Meningkatkan Kemitraan dengan berbagai stakeholder seperti Dinas / Instansi terkait, Perguruan Tinggi, PSKS termasuk dunia usaha dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial.	4 Mengoptimalkan implementasi Undang-Undang, perda dan peraturan lainnya serta tupoksi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial.	4 Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial,;	4 Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;

2	Pengembangan Peningkatan Peningkatan Berkelanjutan	1	Peningkatan peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat miskin dan rentan	5	Meningkatkan Sinergitas dan Jejaring Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan multi Stake Holder serta Mitra Kerja.	5	Mengoptimalkan kerjasama dan sinergitas dengan Kab/Kota dalam implementasi dan pengalokasian anggaran APBD Kabupaten/Kota	5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	5	Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah.
		2	Peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan rentan			6	Memfaatkan kerjasama / kemitraan dengan berbagai lembaga untuk melakukan pendataan PMKS secara akurat.				
3	Perluasan dan Peningkatan Akses Pelayanan Dasar	1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan			7	Mengoptimalkan network / jaringan komunikasi dan informasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta Masyarakat Penyelenggara dan Pemerhati Masalah Kesejahteraan Sosial.				
		2	Meningkatkan Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan			8	Memfasilitasi Balai/Panti Sosial untuk menangani PMKS di Provinsi maupun Kabupaten/Kota				
		3	Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi Verifikasi, validasi, dan sistem pengelolaan data PMKS sebagai basis data terpadu								
4	Penguatan Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS)								
		2	Peningkatan kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan Sosial								
		3	Peningkatan penerapan standar pelayanan pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial								

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang merumuskan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang terpilih untuk Periode 2018-2023 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Adapun Visi dari Kepala Daerah terpilih yaitu ***“Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kepala Daerah terpilih menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Untuk Mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang terpilih periode tahun 2019-2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai keterkaitan dengan Misi ke -1 (satu) Kepala Daerah terpilih yaitu *“Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat”*.

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Sosial, yang dicanangkan untuk mendukung Misi ke- 1 (satu) Pemerintah Daerah tersebut adalah :

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Program Penanganan Bencana;
4. Program Rehabilitasi Sosial;
5. Program Pengelolaan Makam Pahlawan..

3.2.1. Tujuan

Dalam mempercepat tercapainya Misi ke-1 (satu) Kepala Daerah terpilih periode tahun 2019-2023, Maka tujuan pembangunan dari pada Dinas Sosial yaitu :

- a) Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

3.2.2. Sasaran

Untuk mendukung tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, maka sasaran untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2023 merupakan penyempurnaan rencana kerja (Renja) murni 2023 dengan harapan dapat mendukung keberhasilan pencapaian penyelenggaraan Pembangunan khususnya kesejahteraan sosial. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk perubahan rencana kerja tahun 2023 beserta pendanaan dan target kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				20.319.288.693			21.657.598.693	1.338.310.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Kategori	6.297.255.123,00	A	Kategori	7.327.255.123,00	1.030.000.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	laporan	109.554.360,00	13	laporan	109.554.360,00	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dok	37.730.820,00	7	dok	37.730.820,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	dok	9.271.340	2	dok	9.271.340,00	-

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	6.380.990	1	dok	6.380.990,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dok	4.675.010	2	dok	4.675.010,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	5.815.450	1	dok	5.815.450,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	12	Dok	45.680.750	12	Dok	45.680.750,00	-

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Administrasi Keungan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keungan Perangkat Daerah	12	laporan	4.696.238.003	12	laporan	4.696.238.003,00	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang	4.679.104.493	50	Orang	4.679.104.493,00	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	laporan	7.953.310	12	laporan	7.953.310,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	laporan	9.180.200	12	laporan	9.180.200,00	-

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	laporan	30.718.800	12	laporan	120.718.800,00	90.000.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	Dokumen	30.718.800	10	Dokumen	30.718.800,00	-
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	50	Orang	90.000.000,00	90.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	laporan	405.009.870	12	laporan	445.009.870,00	40.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	72.089.670	1	Paket	72.089.670,00	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	80.160.000	2	Paket	80.160.000,00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	12	Paket	45.987.200	2	Paket	45.987.200,00	-

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
		Penggandaan yang Disediakan							
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	9.624.000	10	Dokumen	9.624.000,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	156.149.000	12	Laporan	196.149.000,00	40.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	41.000.000	12	Dokumen	41.000.000,00	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	-			-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	laporan	182.590.110	12	laporan	872.590.110,00	690.000.000,00

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	-	1	Unit	325.000.000,00	325.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	123.198.570	4	Unit	368.198.570,00	245.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit	59.391.540	1	Unit	179.391.540,00	120.000.000,00
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	500.281.980	12	Laporan	535.281.980,00	35.000.000,00
	Penyediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	42.181.980	12	Laporan	49.181.980,00	7.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12	Laporan	14.140.000	12	Laporan	14.140.000,00	-

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	443.960.000	12	Laporan	471.960.000,00	28.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	372.862.000	12	Laporan	547.862.000,00	175.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	238.114.000	30	Unit	263.114.000,00	25.000.000,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	134.748.000	2	Unit	284.748.000,00	150.000.000,00

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Menerima Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Sosial	16,20	Persen	35.000.000	16,20	Persen	35.000.000,00	-
		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	58,33	Persen	1.350.034.540	58,33	Persen	1.462.034.540,00	112.000.000,00
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang dibina dan diberi bantuan sosial	20	Kelompok	35.000.000	10	Kelompok	35.000.000,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	0	Kelompok	-			-	-
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	200	Keluarga	35.000.000	450 Keluarga	Kelompok	35.000.000,00	-

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	7	Jenis	1.350.034.540	7	Jenis	1.462.034.540,00	112.000.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	277	Orang	109.950.000	277	Orang	109.950.000,00	-
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	26	Orang	49.591.440	26	Orang	49.591.440,00	-
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	277	Lembaga	1.190.493.100	277	Lembaga	1.302.493.100,00	112.000.000,00

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan dasar	35,75	Persen	3.054.369.300	35,75	Persen	3.160.769.300	106.400.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima Bantuan Sosial	16007	Orang	2.686.894.000	16007	Orang	2.750.794.000	63.900.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	16007	Orang	2.291.820.500	16007	Orang	2.310.720.500,00	18.900.000,00
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten Kota	100	Orang	50.000.000	100	Orang	70.000.000,00	20.000.000,00
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	450	Orang	245.073.500	450	Orang	245.073.500,00	-
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	150	Orang	100.000.000	150	Orang	125.000.000,00	25.000.000,00

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang menerima Bantuan Sosial	30	Orang	367.475.300	30	Orang	409.975.300,00	42.500.000,00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	200	Orang	282.500.500	200	Orang	325.000.500,00	42.500.000,00
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	0	Orang	-	30	Orang	-	-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	30	Orang	35.000.000	25	Orang	35.000.000,00	-

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	30	Orang	49.974.800	30	Orang	49.974.800,00	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat (DTKS) yang menerima Jaminan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	98	Persen	8.821.653.300	98	Persen	8.821.563.300	- 90.000,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola	5	Dokumen	8.821.653.300	5	Dokumen	8.821.563.300	- 90.000,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	129417	Keluarga	200.000.000	129417	Keluarga	200.000.000,00	-

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	135000	Keluarga	7.797.653.300	135000	Keluarga	7.797.563.300,00	- 90.000,00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	3360	Orang	824.000.000	3360	Orang	824.000.000,00	-
	PROGRAM PENANGNAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	Persen	684.631.830	100	Persen	761.131.830,00	76.500.000,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima Bantuan Sosial	400	Orang	358.568.950	400	Orang	358.568.950,00	-
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	400	Orang	358.568.950	400	Orang	358.568.950,00	-

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
		Permukiman 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota							
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Intensitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	6	Kali	326.062.880	6	Kali	402.562.880,00	76.500.000,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	0	Kampung	-	3	Kampung	-	-
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga bencana	55	Orang	326.062.880	100	Orang	402.562.880,00	76.500.000,00

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
		Kewenangan Kabupaten / Kota							
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	100	Persen	76.344.600	100	Persen	89.844.600,00	13.500.000,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab / Kota yang dipelihara	3	Makam	76.344.600	3	Makam	89.844.600,00	13.500.000,00
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	3	Makam	49.464.600	3	Makam	62.964.600,00	13.500.000,00

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan/Program, Kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/Berkurang
			Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	
					Murni			Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (9 - 6)
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	12	Laporan	26.880.000	12	Laporan	26.880.000,00	-
JUMLAH TOTAL					20.319.288.693			21.657.598.693	1.338.310.000

BAB IV PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang selaku penanggung jawab dan pelaksana teknis penyelenggaraan pembangunan Urusan Bidang Sosial telah menyusun Dokumen Rencana Kerja untuk tahun 2023 dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan pada Urusan Bidang Sosial. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2023, pada intinya memuat Program / Kegiatan pada Rencana Strategis 2018-2023.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini akan menjadi pedoman bagi melaksanakan Penyusunan RKA pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2023. Pada akhirnya Kami menyadari, bahwa Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Sumedang, 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG
Kepala

H. DIKDIK SADIKIN, AK.S., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19720515 199803 1 010